



## SIARAN PERS

Otorita Ibu Kota Nusantara

9 Oktober 2023

## Berkunjung ke Kemenkeu, Otorita IKN Diskusikan Percepatan Pengembangan Pusat Inovasi IKN

**JAKARTA** – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Yayasan Benih Baik gelar diskusi dengan Kementerian Keuangan untuk kembangkan *smart village* IKN. *Smart village* merupakan bentuk social infrastructure yang tidak hanya fokus pada fisik bangunan, tapi juga pada aspek “human”. Pada tahap awal, *smart village* akan difokuskan pada bidang pendidikan di Desa Pamaluan, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur.

Diskusi yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan pada Senin (09/10/2023) merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan. Selain itu ini juga bertujuan untuk membahas cara memanfaatkan insentif pajak, khususnya *tax deduction* guna mendukung percepatan penyiapan berbagai sarana dan prasarana pendidikan.

Menurut Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, pemerintah ingin mengembangkan IKN sebagai pusat inovasi dengan memanfaatkan berbagai fasilitas penanaman modal kepada pelaku usaha.

“Kami sekarang ini sedang mendorong supaya ada satu model dan saya mengatakan ke Pak Imam (B. Prasodjo) saya ingin kloning yang ada di Purwakarta dibangun di sana (IKN) *smart village*,” ujar Dhony.

Ia berharap melalui pemanfaatan *tax deduction* sebagai insentif dapat mengakselerasi investasi yang bersumber dari non-APBN untuk perusahaan-perusahaan yang ingin berkontribusi pada pembangunan kawasan pendidikan.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot, mengungkapkan ada sejumlah fasilitas untuk menjadikan IKN sebagai pusat inovasi.

“Itu (kegiatan penelitian dan pengembangan) diberikan *super tax deduction* sampai dengan 350 persen, kemudian untuk pelatihan (dan/atau pendidikan) 250 persen,” ujar Yuliot.

Fasilitas pengurangan pajak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara atau disebut sebagai PP Kemudahan Berusaha IKN.

Di dalam Pasal 42 PP Kemudahan Berusaha di IKN, kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan di IKN untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu diberikan fasilitas pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 250 persen.



Sementara untuk kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan invensi, mengembangkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan atau alih teknologi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional.

Dalam kesempatan yang sama Tim Ahli Yayasan Benih Baik Imam B. Prasodjo menjelaskan pentingnya membangun sisi sosial dari sebuah kota. Menurutnya, pembangunan fisik harus diiringi dengan pembangunan yang memperhatikan sisi manusia, modal sosial, dan lingkungan.

“Paradigmanya kita kasih nama *human eco hapiness*. *Human development* membangun IKN harus tertuju pada orang-orang yang terpercaya, terus membangun *social capital* di dalamnya ekonom, antropolog, *cultural capital* dan sebagainya, baru yang ketiga adalah *ecological capital*. Ini harus menyatu. Infrastruktur hanya *supporting*,” ungkap Imam.

Imam melanjutkan, bahwa penting untuk juga membangun lembaga sosial di IKN. Oleh karena itu Yayasan Benih Baik akan membangun Kampung Ilmu khususnya di Desa Pamaluan.

“Kampung ilmu, mari kita buat wadah pemberdayaan dengan lingkup desa, tapi seluruh pojok di dalam desa ada sentral sentral pemberdayaan,” ungkap Imam. “Negara satu sisi harus tanggungjawab, tapi menurut saya perusahaan dan masyarakat itu harus dikelola. Mudah-mudahan Benih Baik bisa membantu menggalang dana dengan transparan sehingga menjadi lembaga yang terpercaya,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa Otorita IKN perlu memperhatikan status pemakai dan menyiapkan aturan yang lengkap terkait anggaran serta barang.

“Otorita IKN bukan hanya pengguna tetapi pengelola, yang artinya memiliki dan mengelola. Oleh karena itu perlu memiliki seluruh aturan yang komplit sebagai pengelola,” jelas Suahasil.

Sebagai informasi, di Otorita IKN akan dilakukan pengalihan dari pengguna anggaran/pengguna barang menjadi pengelola keuangan. Hal ini merupakan implikasi atas disahkannya revisi undang-undang IKN.

**Catatan:**

***Kutipan dokumentasi foto dan keterangan kegiatan di bagian bawah Siaran Pers.***

**Tim Komunikasi Otorita Ibu Kota Nusantara**

Narahubung: Sekretariat OIKN  
(+62) 811-8115-8888

Website : [ikn.go.id](http://ikn.go.id)  
Instagram : [instagram.com/ikn\\_id](https://www.instagram.com/ikn_id)  
Facebook : [facebook.com/iknindonesia1](https://www.facebook.com/iknindonesia1)  
Twitter : [twitter.com/ikn\\_id](https://twitter.com/ikn_id)  
Youtube : IKN Indonesia



NUSANTARA

# SIARAN PERS

#KotaDuniauntukSemua  
#Nusantara  
#IbuKotaNegara

---

Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah laut seluas 68.189 hektare. Nusantara akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ialah otoritas yang mengelola dan mengatur Nusantara. OIKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia, bekerja langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. OIKN bertugas sebagai pendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.

---

**DOKUMENTASI FOTO**  
**Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara**



Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe (kanan) dan Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot (kanan) dalam diskusi bersama Wakil Menteri Keuangan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (09/10/2023).



NUSANTARA

# SIARAN PERS



Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam diskusi bersama Otorita IKN di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (09/10/2023).



NUSANTARA

# SIARAN PERS



Suasana diskusi Otorita IKN dengan Wakil Menteri Keuangan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (09/10/2023).